



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH

Muhammad Havis

Universitas Samudra

hmhavis@gmail.com

Rizki Imam Maulana

Universitas Samudra

rizkiimammaulana68@gmail.com

Wahyuni Siregar

Universitas Samudra

wahyunisiregar953@gmail.com

Puti Andiny

Universitas Samudra

putiandiny@unsam.ac.id

Safuridar

Universitas Samudra

safuridar@unsam.ac.id

Abstract. *Economic growth is an important indicator that reflects the success of regional development. This study aims to analyze the effect of Regional Own-Source Revenue (PAD), Capital Expenditure, and General Allocation Fund (DAU) on economic growth in Aceh Province. The research employs a quantitative approach using time series data from 2009 to 2023, obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). Data were analyzed using multiple linear regression with the Eviews 9 software. The results show that PAD and DAU have a positive and significant effect on economic growth, while Capital Expenditure has a negative and insignificant effect. Simultaneously, the three variables have a significant impact on economic growth with a coefficient of determination (R^2) of 78.44%. These findings suggest that local governments need to optimize PAD and manage transfer funds more productively to accelerate sustainable economic growth in Aceh Province.*

Keywords: *Regional Own-Source Revenue, Capital Expenditure, General Allocation Fund, Economic Growth*

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data runtut waktu (time series) periode 2009–2023 yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 78,44%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD dan mengelola dana transfer secara produktif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Aceh.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

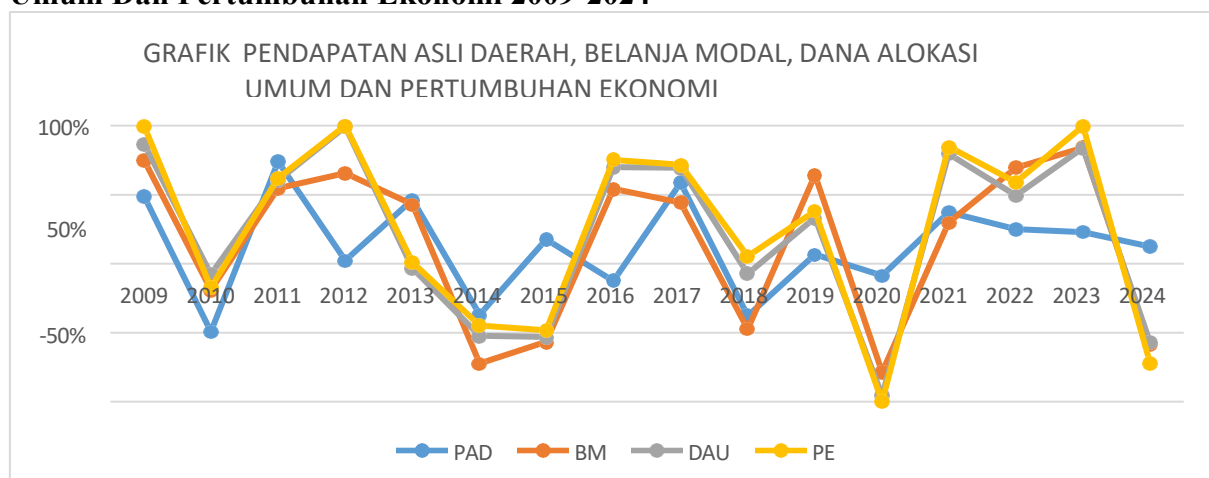
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sektor perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Menurut Nuraini (2017), pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang dan jasa di suatu wilayah, yang pada akhirnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif. Salah satu indikator utama kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk membiayai pembangunan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Selain itu, Belanja Modal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat mendorong produktivitas ekonomi masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007). Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai sarana pemerataan fiskal antar daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah (Sidik, 2003).

Di Provinsi Aceh, perkembangan PAD, Belanja Modal, dan DAU selama beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi daerah. PAD yang belum optimal dapat membatasi ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, alokasi belanja modal yang relatif kecil dibandingkan belanja rutin sering kali menghambat peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Ketergantungan terhadap DAU dari pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih lemah (Darise, 2009; Kusnandar & Siswanto, 2012).

Untuk memperlihatkan kondisi empiris dari ketiga variabel ini, berikut disajikan grafik perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh selama periode 2009–2023 sebagai berikut:

Gambar 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum Dan Pertumbuhan Ekonomi 2009-2024



Sumber; BPS (Diolah)

Gambar 1 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh selama periode 2009–2023 (BPS Aceh, 2024). Secara umum, PAD dan DAU mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sementara Belanja Modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola fluktuatif dari tahun ke tahun.

Peningkatan PAD terlihat terutama pada periode 2015–2019, yang menandakan adanya peningkatan kemampuan fiskal daerah dalam menggali sumber penerimaan sendiri. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun tajam akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, peningkatan DAU menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat (Sidik, 2003; Darise, 2009)

Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pengaruh PAD, Belanja Modal, dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan pembangunan ke depan.

KAJIAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009). Menurut Rudrigger (2006:112), produk domestik bruto/GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

B. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber PAD, pertama pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, retribusi merupakan Pungutan daerah yang digunakan untuk membayar layanan atau untuk mendapatkan otorisasi tertentu yang diberikan atau secara tegas diberikan oleh pemda

untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan Pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencakup laba dalam penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal milik negara.

C. Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

D. Dana Alokasi Umum

Sidik (2003) mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu komponen dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Menurut Darise (2009) menjelaskan bahwa dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dan didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketidakseimbangan keuangan daerah. Dana alokasi umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan diisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Menurut Kusnandar & Siswanto (2012) dana alokasi umum lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

METODE PENELITIAN

jenis data yang akan digunakan dalam hal ini dinyatakan sebagai data time series diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2009 sampai 2023. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk mengolah informasi kuantitatif melalui estimasi model regresi berganda. Data diolah menggunakan Eviews 9. Tahapan analisis kuantitatif meliputi estimasi model regresi

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH

linear berganda. Secara matematis, analisis Regresi berganda menggunakan model struktural sebagai berikut:

$$Y_t = a + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e_t$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X1 = Pendapatan asli

daerah X2 = belanja modal

X3 = Dana Alokasi Umum

E = error terms $t = 1, 2, 3, \dots, 10$ (time series 2009 - 2023)

A. Uji Asumsi Klasik

Untuk melihat kebaikan data dan memperoleh persamaan regresi yang valid untuk melakukan prediksi, maka pada penelitian ini akan dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

B. Uji Signifikansi

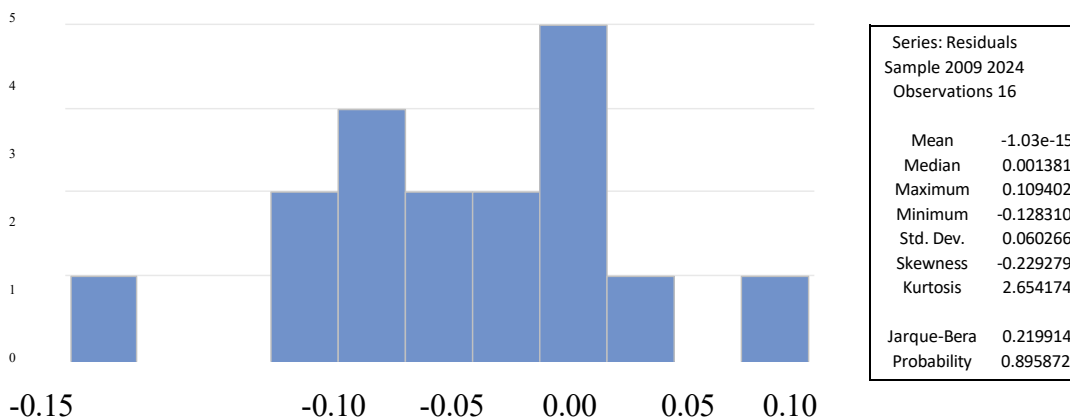
Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi Uji Parsial, Uji Simultan dan Koefisien Determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 2 Uji Normalitas



Sumber: Eviews(diolah)

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel di atas. Nilai probability jarque-bera sebesar $0,9895872 > 0,05$ dapat disimpulkan pada uji ini data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 1 Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 10/20/25 Time: 23:36
Sample: 2009 2024
Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.737979	2600.829	NA
X1	0.000650	472.6751	1.256580
X2	0.001496	1157.826	1.192307
X3	0.001617	1137.512	1.082861

Sumber: Eviews(diolah)

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas yang ditampilkan pada tabel di atas diperoleh bahwa Pendapatan asli daerah, belanja modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terdapat multikolinieritas karena nilai VIF < 10.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 2 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.475261	Prob. F(2,10)	0.6351
Obs*R-squared	1.388823	Prob. Chi-Square(2)	0.4994

Sumber: Eviews(diolah)

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat tabel di atas di peroleh bahwa Prob. Chi-Square = 0,4994 > 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada uji ini

d. Uji Heteroskedasitas

Tabel 3 Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.934078	Prob. F(3,12)	0.4543
Obs*R-squared	3.028985	Prob. Chi-Square(3)	0.3872
Scaled explained SS	1.409194	Prob. Chi-Square(3)	0.7034

Sumber: Eviews(diolah)

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat pada tabel di atas di peroleh bahwa Prob Chi-Square = 0,7034 > 0,05 yang menunjukkan bahwa pada uji ini tidak terdapat heteroskedasitas

e. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 10/20/25 Time: 23:17
 Sample: 2009 2024
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.947054	0.859057	10.41497	0.0000
X1	0.087971	0.025500	3.449825	0.0048
X2	-0.040475	0.038674	-1.046568	0.3159
X3	0.160039	0.040209	3.980154	0.0018
R-squared	0.784405	Mean dependent var		11.86938
Adjusted R-squared	0.730506	S.D. dependent var		0.129793
S.E. of regression	0.067379	Akaike info criterion		-2.344642
Sum squared resid	0.054480	Schwarz criterion		-2.151495
Log likelihood	22.75713	Hannan-Quinn criter.		-2.334751
F-statistic	14.55330	Durbin-Watson stat		1.718669
Prob(F-statistic)	0.000266			

Sumber: Eviews(diolah)

f. Uji Persial (Uji-t)

Hasil esrimasi diketahui bahwa:

- Nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah $0,0048 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara persial pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.
- Nilai probabilitas Belanja Modal $0,3159 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara persial belanja modal pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Nilai probabilitas dana Alokasi Umum $0,0018 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara persial dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

g. Uji simultan

Diketahui uji F dalam penelitian ini diperoleh sebesar $0,000266 < 0,05$ maka dapat dinyatakan secara simultan bersamaan bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan bersamaan.

h. Uji Kosisien Determinasi (R2)

Diketahui nilai R-squared sebesar $0,7844$ maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersamaan sebesar $78,44\%$. Sedangkan sisanya sebesar $21,56\%$ nya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

i. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan prob. $0,0048 > 0,05$ terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar

0.087971. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya kosinsten untuk menghasilkan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Brata, 2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan sejalan dengan (Setyawati, 2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2005, serta sejalan dengan (Saraswati dan Ramantha, 2018), pada penelitian terdahulu terlihat bahwa PAD memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena pada dasarnya peningkatan PAD merupakan akses meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila terjadi peningkatan PAD akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

j. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan prob. $0.3159 > 0,05$ terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar $-0,040475$. artinya belanja modal tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti meskipun ada hubungan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan tersebut tidak cukup kuat atau tidak menunjukkan pengaruh yang jelas pada perekonomian.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nopiani et al. (2016) menunjukkan belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Buleleng, dan tidak sejalan dengan penelitian dari (Nurhidayati Islamiah, 2015) dengan judul Analisis pengaruh Belanja Modal dan Tingkat inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak di Indonesia. Semakin tinggi belanja modal ataupun pengeluaran pemerintah tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat, serta tidak sejalan dengan (Darwin dkk 2023) Hasil penelitian menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara dengan nilai signifikan. Walaupun signifikan namun Provinsi Sumatera Utara memiliki fenomena pertumbuhan ekonomi yang eksklusif.

k. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan prob. $0,0018 < 0,05$ terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0.160039 . Ini menunjukkan bahwa belanja modal bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya cukup besar atau kosinsten untuk menghasilkan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maryati dan Endrawati (2010) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dan sejalan dengan dengan penelitian Permanasari (2013) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan peran DAU sangat signifikan karena belanja daerah leih didominasi oleh jumlah DAU, serta sejalan dengan (Suharlina, 2019) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh menggunakan data time series periode 2009–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar $0,0048 < 0,05$. Artinya, peningkatan PAD berkontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.

Sementara itu, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar $0,3159 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemungkinan karena sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kegiatan nonproduktif atau belanja rutin.

Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar $0,0018 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Secara simultan, ketiga variabel independen (PAD, Belanja Modal, dan DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 78,44%. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya optimalisasi PAD dan pemanfaatan DAU secara produktif, perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Brata, A. G. (2004). *Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah: Studi empiris pada kabupaten dan kota di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 5(1), 1–18.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. (2024). *Aceh dalam angka 2024*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Darwanto. (2007). *Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(1), 1–12.
- Darwin, E., Lubis, I., & Nasution, Z. (2023). *Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Regional, 11(2), 45–56.
- Kusnandar, & Siswanto, B. (2012). *Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 7(2), 101–112.
- Maryati, S., & Endrawati, R. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 3(2), 55–63.
- Nopiani, P. D., Suwendra, I. W., & Yulianthini, N. N. (2016). *Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 1–10.
- Nuraini. (2017). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(2), 75–83.
- Nurhidayati, I. (2015). *Analisis pengaruh belanja modal dan tingkat inflasi terhadap*

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH

- pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(1), 45–56.
- Permanasari, D. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 21(2), 178–188.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).
- Saad, W. (2009). *The impact of government expenditure on economic growth: The case of Lebanon*. Journal of Economic and International Finance, 1(2), 45–52.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setyawati, S. (2007). *Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2001–2005*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 8(1), 45–57.
- Sidik, M. (2003). *Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 7(2), 37–55.
- Suharlina. (2019). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, 6(3), 88–97.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Untoro, J. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah